

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kesehatan masyarakat, maka tentunya akan menghasilkan masyarakat yang produktif (Adiska, et al. 2017). Menurut Kemenkes (2016) menyatakan bahwa kesehatan tidak hanya dari segi fisik saja, melainkan ada 3 elemen tambahan diantaranya yaitu mental (jiwa), sosial dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat yaitu faktor lingkungan (*environment*) yang terdiri dari fisik, biologis dan sosial kultural, kemudian faktor perilaku (*life styles*) yang mencakup gaya hidup seseorang, dan juga pelayanan kesehatan (*health care services*). Maka dari itu, untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal, pemerintah bergerak dibidang pelayanan kesehatan dengan mendirikan suatu wadah seperti rumah sakit, puskesmas bahkan posyandu bagi masyarakat di setiap daerahnya untuk menjangkau dan memantau status kesehatan masyarakat.

Rumah sakit merupakan wadah tertinggi bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta fasilitas kesehatan. Setiap rumah sakit pasti memiliki sistem manajemen tersendiri untuk membuat rumah sakit tersebut semakin maju dan berkembang di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk manajemen rumah sakit ialah dengan adanya manajemen logistik medis. Manajemen logistik medis sangat erat kaitannya dengan bagaimana suatu rumah sakit dalam melakukan proses pengelolaan obat dan alat kesehatan yang ada. Tentunya dengan tersedianya obat, alat kesehatan serta fasilitas kesehatan hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen dari pemerintah dalam terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Namun, terkait manajemen logistik medis masih terdapat banyak kekeliruan sebagai contoh yaitu adanya ketidaksinkronan antara sistem pengadaan pengelolaan barang dengan stok fisiknya. Hal ini yang mestinya diperketat secara pengawasan mutu terutama di bagian gudang farmasi oleh apoteker penanggungjawab di

setiap instalasi farmasi rumah sakit. Apoteker dituntut untuk menjalankan profesiannya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian guna memperbaiki apabila ada pelayanan yang kurang optimal dan mutu yang terbaik dapat dipertahankan (Putri Dwi Yulianingsih, et al. 2023).

Dalam manajemen logistik di Instalasi Farmasi Rumah Sakit terbagi atas 2 bagian, yaitu ada obat rak JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikhususkan untuk diberikan kepada pasien yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dan obat rak non-JKN yang diberikan kepada pasien jaminan umum, asuransi ataupun perusahaan. Setiap rumah sakit pada umumnya memiliki formularium tersendiri sebagai dasar dalam melakukan pengadaan dan pengelolaan sediaan farmasi yang sudah disusun oleh Tim Farmasi dan Terapi (TTF), disepakati oleh staf medis dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit (Teti Sutriati, dkk. 2022). Menurut Teti (2022) obat yang terpilih di rak JKN merupakan obat yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sejak 01 Januari 2014 dan sudah memiliki bukti yang ilmiah terkait khasiat, mutu dan harga obatnya. Saat penyusunan maupun revisi formularium rumah sakitpun, biasanya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan tentunya sama dengan formularium nasional berdasarkan efek terapeutik obat serta harga yang ekonomis agar dihasilkan formularium yang selalu mutakhir dan rasional. Pemanfaatan formularium ini pun bertujuan untuk mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan pengelolaan obat.

Namun, sistem pengelolaan sediaan obat di Indonesia masih belum optimal yaitu mencapai kurang dari 80% (Septi, et al. 2022). Jika pengelolaan sediaan obat di suatu rumah sakit tidak terkontrol dengan baik, pastinya akan mempengaruhi pandangan masyarakat terkait mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. Menurut Septi (2022) ada beberapa hal yang menjadi faktor penting dalam sistem pengelolaan sediaan obat yaitu fasilitas rumah sakit yang memadai, sumber daya manusia atau banyaknya tenaga medis profesional yang mendukung pelayanan, kelengkapan administrasi rumah sakit dan sistem informasi. Pengelolaan obat juga erat kaitannya dengan anggaran belanja setiap instalasi kesehatan yang tentunya memakan kurang lebih 40%-50% jumlah

operasional kesehatan secara nasional (Andini Rezeki, et al. 2021). Menurut Andini (2021) terkait pengelolaan obat di rumah sakit merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan, mengingat jika apabila terjadi ketidaksesuaian antara pengelolaan obat dengan prosedur yang ada maka akan menghasilkan suatu masalah baru yaitu tumpang tindihnya anggaran rumah sakit dan pemakaian yang tidak tepat guna. Rumah Sakit X merupakan salah satu Rumah Sakit Swasta yang ada di Kabupaten Karawang yang masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan sediaan kefarmasian. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang membuat pengelolaan sediaan farmasi menjadi terganggu.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu bentuk bukti nyata bahwa pengelolaan sediaan farmasi di Rumah Sakit X Karawang masih belum sesuai dengan prosedurnya yaitu banyaknya terjadi hutangan obat saat pasien sudah selesai berobat ke dokter. Hutangan obat inilah yang membuat penilaian pasien terhadap suatu rumah sakit menurun. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya hutangan obat di rumah sakit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian formularium Rumah Sakit X di Karawang dengan formularium JKN nasional?
2. Berapa persen jumlah obat JKN yang *fast moving* dan *slow moving*?
3. Bagaimana korelasi antara ketidaksesuaian pemberian obat dengan kualitas dan kepuasan pasien?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya proposal penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui kesesuaian formularium Rumah Sakit X di Karawang dengan formularium JKN nasional.
2. Mengetahui persen jumlah obat JKN yang *fast moving* dan *slow moving*.
3. Mengetahui korelasi antara ketidaksesuaian pemberian obat dengan kualitas dan kepuasan pasien.

1.3 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah diketahui permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit X Karawang, maka manfaat penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Memberikan pengalaman yang baru bagi peneliti dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di dunia kerja
2. Memudahkan para apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam mengetahui obat apa saja yang sering mengalami hutangan agar dalam proses pemesanan barang ke PBF, obat tersebut dapat dipesan dengan kuantitas lebih dari pemesanan sebelumnya
3. Bahan evaluasi juga untuk Rumah Sakit X Karawang agar lebih diperhatikan dan diperketat lagi dalam sistem pengadaan dan pengelolaan sediaan terutama di Instalasi Farmasi Rumah Sakit agar tidak terganggunya proses pelayanan kefarmasian dan pasien pun memiliki kepuasan tersendiri akan pelayanan yang telah diberikan.

